

UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SLEMAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA SERENTAK 2015 (STUDI DI SMA N 2 SLEMAN)

**EFFORTS OF GENERAL ELECTIONS COMMISSION (GEC) OF SLEMAN REGENCY TO INCREASE BEGINNER VOTERS' PARTICIPATION IN THE 2015 SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS
(A Study at SMAN 2 Sleman)**

KURNIA PURWITA SARI (12401244007)

FIS, Universitas Negeri Yogyakarta
nia.purwita88@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pilkada serentak 2015, partisipasi pemilih pemula dalam pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sleman, dan hambatan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pilkada 2015.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anggota KPU Kabupaten Sleman bidang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan humas, Guru SMA N 2 Sleman, dan Siswa SMA N 2 Sleman. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check*. Teknik analisis data pada penelitian ini melalui 3 tahap meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman yang memberikan dampak signifikan dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pilkada serentak 2015 adalah TOT (pemilos dan untuk guru PKn) dan Lomba cerdas cermat; *kedua*, partisipasi pemilih pemula dalam pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sleman sebesar 72, 69 %, pada pilkada 2010 partisipasi pemilih pemula mengalami peningkatan dari pilkada 2010 sebesar 70, 23 % , *ketiga*, hambatan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman pada pilkada serentak 2015 adalah kurangnya sumber daya manusia dalam hal sosialisasi dan kesulitan dalam penyampaian terhadap pemilih disabilitas.

Kata kunci : *Partisipasi pemilih pemula, upaya dan hambatan KPU Sleman.*

Abstract

This study aimed to describe efforts made and constraints faced by GEC of Sleman Regency to increase beginner voters' participation in the 2015 simultaneous regional elections. This was a descriptive study employing the qualitative approach. The research subjects were the commissioner of GEC of Sleman Regency serving as the Head of Division of Socialization, Voter Education, and Public Relations, teachers, and student representatives of SMAN 2 Sleman. The data were collected through interviews and observations. The data trustworthiness was enhanced by the cross check technique. The data analysis was the inductive data analysis consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study were as follows. First, the efforts that GEC of Sleman made which had significant impacts to

increase beginner voters' participation in the 2015 simultaneous regional elections were TOT (for student council president election and for Civic Education teachers) and quiz competitions. Second, the beginner voters' participation in the 2015 simultaneous regional elections in Sleman Regency was 72.69%, indicating that their participation increased from 70.23% in the 2010 simultaneous regional elections. Third, the constraints that GEC of Sleman faced in the 2015 simultaneous regional elections were constraints in quantity, namely the lack of human resources in the socialization and the difficulty in delivering information to disabled voters.

Keywords: *beginner voters' participation, efforts and constraints of GEC of Sleman*

CATATAN:

Jika SMAN 2 Sleman diterjemahkan, terjemahannya adalah Public Senior High School 2 of Sleman, disingkat PSHS 2 of Sleman.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama bagi negara demokrasi. Demokrasi sendiri merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau masyarakat dan pemerintahan yang baik (Cholisin, 2013: 19). Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebaikan bersama sesuai dengan nilai demokrasi di atas perlu diwujudkan melalui pemilihan umum.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Scumpeter (2007: 57) yang menyatakan bahwa pemilihan umum yang bebas dan berkala merupakan kriteria utama bagi suatu sistem politik yang dapat disebut sebuah demokrasi. Pemilihan umum merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara untuk menyalurkan aspirasinya sekaligus sebagai suatu bentuk pembelajaran dalam bidang politik yang bersifat terbuka sehingga dapat meningkatkan pemahaman politik warga

negara. Dengan meningkatnya pemahaman warga negara diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi.

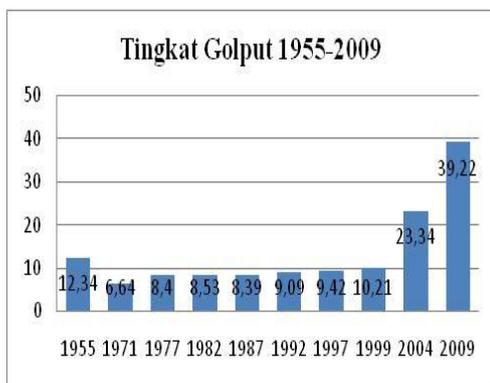
Sebagai konsekuensi negara demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali pemilihan umum (Pemilu) yaitu Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah mulai dilaksanakan pada tahun 2005 hingga saat ini.

Sejak tahun 2005 muncul momentum baru mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung hal ini menandai munculnya tahapan baru bagi Indonesia. Dengan pemilihan daerah secara langsung ini diharapkan ada keterbukaan antara pemerintah dengan rakyat dalam hal demokrasi. Demokrasi yang baik apabila sistem pemerintahan yang diselenggarakan

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini rakyat adalah pemegang kedaulatan.

Munculnya tahapan baru dalam demokrasi ini diharapkan dapat mengarahkan rakyat kearah demokrasi yang sesungguhnya dimana rakyat paham dan sadar akan pentingnya demokrasi. Namun yang terjadi justru hasil patisipasi rakyat Indonesia menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Dalam kata lain golongan putih (golput) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut ini tabel tingkat golput yang terjadi di Indonesia dari tahun 1955 - 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Golongan Putih (Golput) tahun 1955-2009



Sumber: Kacung Marijan (2010:126)

Dari tabel 1 terlihat bahwa tingkat golput meningkat secara signifikan sejak pemilu tahun 1999 (pasca reformasi). Fenomena ini dapat disebabkan karena kondisi politik yang ada di Indonesia, atau bahkan masyarakat belum menemukan

calon yang sesuai dan ideal menurut mereka. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Marijan (2006: 122-125) bahwa ada lima alasan masyarakat memilih golput yakni: 1) bagi pemilih datang ke TPS tidak lagi penting karena tidak ada isu yang signifikan, 2) globalisasi semakin mereduksi kekuatan negara sehingga golput menjadi fenomena global, 3) menurunnya tingkat kepuasan masyarakat dikaitkan dengan turunnya performance pemerintah, 4) tingkat golput juga bisa disebabkan karena terlalu tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menjabat, 5) meningkatnya golput diakibatkan kecenderungan budaya politik yang ada dalam masyarakat.

Dari pendapat Marijan menunjukkan menurunnya golput bukan menjadi dasar kesadaran politik masyarakat rendah namun dapat disebabkan karena fenomena global, terlalu tinggi kepercayaan masyarakat atau bahkan kurang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Sehingga masyarakat menganggap bahwa golput merupakan hal yang tepat dan biasa dalam pemilu atau pilkada.

Indonesia melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak untuk pertama kali pada tahun 2015. Pilkada serentak ini dilakukan secara bersama-sama yang diikuti oleh berbagai daerah di

Indonesia salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di DIY terdapat 5 Kabupaten tetapi hanya 3 kabupanten yang mengikuti pilkada serentak khususnya Sleman. Dikarenakan ini merupakan pilkada pertama tentu banyak masalah yang muncul yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di Kabupaten Sleman

No	Pemilu	2004	2005	2009	2010	2014	2015
1.	Pileg	81,30 %		72,68 %		81,40 %	
2.	Pilpres I	78,81 %		77,61 %		81,70 %	
3.	Pilpres II	76,04 %					
4.	Pilkada		77,69 %		70,68 %		72,23 %

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman pada 20 Januari 2016

Dari data di atas menunjukkan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sleman mengalami penurunan dari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. Pada pilkada serentak 2015 partisipasi masyarakat sebanyak 72,23 % sedangkan pada pemilihan legislatif sebanyak 81,40 % dan pemilihan presiden dan wakil presiden sebanyak 81,70%. Tetapi apabila dilihat dari partisipasi pemilihan kepala daerah tahun 2010, partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah 2015 mengalami peningkatan.

Dilihat dari target nasional partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sleman mengalami penurunan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan 77,5% partisipasi masyarakat (Sabandar (2015) di akses dari:

<http://m.harianjogja.com/baca/2015/12/11pilkada-serentak-diy-partisipasi-pemilih-tak-sesuai-target-apapenyebabnya-669760> pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 06.00 WIB). Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman sendiri memiliki target sebesar 85%, target tersebut berpacu pada hasil partisipasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan Kabupaten Sleman sendiri partisipasi masyarakat nya sebesar 72,23%.

Berbagai upaya telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum serta upaya agar pemilihan kepala daerah dapat berjalan sesuai dengan asas LUBER dan JURDIL.

Meskipun demikian masih ditemukan berbagai masalah saat pelaksanaan pilkada serentak dimana pawaslu berhasil menyita 1.621 kupon hadiah mobil yang belum sempat dibagikan. Kupon tersebut berisi gambar calon nomor urut 1 yaitu Yuni-Danang (diakses dari:

<http://jogja.tribunnews.com/2015/12/08/breaking-news-pawaslu-sita-1621-kupon-berhadiah-mobil-pada-tanggal-20-Januari-2016-pukul-14.00-WIB>).

Dari latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana Upaya KPU Sleman dalam meningkatkan Partisipasi pemilih pemula pada pilkada serentak 2015, untuk itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sleman sesuai uraian dan berbagai pertimbangan di atas. Penelitian ini dengan judul “Upaya KPU Sleman dalam meningkatkan Partisipasi pemilih pemula pada pilkada serentak 2015”.

METODE

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang akan diteliti yakni pertama, masalah tetap dari awal sampai akhir penelitian, kedua, masalah akan meluas dan mendalam, ketiga, masalah akan berubah total setelah peneliti masuk ke dalam lapangan

(Sugiyono, 2010: 283).

Berdasarkan uraian di atas diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai upaya komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten Sleman dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pilkada serentak 2015 (Studi di SMA N 2 Sleman).

B. Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Dengan kata lain pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang di harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012: 53-54). Subjek dalam penelitian ini : komisioner KPU Sleman yang menjabat sebagai Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Humas, guru Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) serta siswa di SMA N 2 Sleman.

C. Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian dengan judul “Upaya KPU Sleman Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Serentak 2015 (Studi di SMA N 2 Sleman) ” akan dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dan satu sekolah yaitu SMA N 2 Sleman. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2016 sampai April 2016.

D. Tempat pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hal ini didasarkan atas pendapat Creswell (2010: 267) bahwa dalam penelitian kualitatif wawancara yang umum digunakan adalah tidak terstruktur dan terbuka hal ini dilakukan agar memunculkan pandangan dan opini dari para

partisipan. Sedangkan dokumentasi yang dimaksud :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
2. Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.
3. Laporan Pelaksanaan Cerdas Cermat Kepemiluan dan Demokrasi bagi Siswa SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Sleman.

4. Laporan Pelaksanaan Training Of Trainer (Tot) Pendidikan Pemilih untuk Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Sleman.

5. Laporan Pelaksanaan Training Of Trainer (Tot) Pemilu OSIS SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Sleman.

E. Teknik pemeriksaan keabsahan data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *cross check* yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali hasil wawancara antara subjek penelitian dan hasil dari dokumentasi (Bungin, 2001: 95-96).

F. Teknik Analisis Data

Menurut Patton sebagaimana dikutip Moleong (2012: 280) analisis

data adalah proses mengatur urutan, mengorganisir data ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu rangkaian data. Mengacu pada pendapat Sugiyono (2013: 333) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

HASIL DAN Pembahasan PENELITIAN

1. Upaya yang dilakukan KPU Sleman dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pilkada serentak 2015.

Sesuai pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal (1) juga dijelaskan mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi bertugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten/Kota bertugas menyelenggarakan pemilihan Bupati/ Wali Kota.

Guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki visi dan misi. visi tersebut yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan pemilu yang LUBER dan JURDIL (www.kpu.go.id) di akses pada 2 September 2016). Agar visi dan misi terwujud KPU melakukan berbagai upaya. Upaya-upaya yang telah dilakukan KPU antara lain :

a. Kpu Goes To School
pihak KPU Sleman mengirim perwakilan untuk memberikan pengetahuan

mengenai pendidikan politik bagi pemilih pemula serta memberikan sosialisasi mengenai calon-calon kepala daerah, tahap-tahap pemilihan kepala daerah, dll. Sosialisasi ini dilakukan dengan dua tahap yaitu :

1) Upacara Bendera

Dalam kesempatan tersebut Ibu Indah memberikan sosialisasi mengenai waktu akan diselenggarakannya pilkada serentak, calon bupati dan wakil bupati beserta visi dan misi serta program kerjanya.

2) Mengajar di Kelas

Sedangkan saat mengajar di kelas beliau memberikan pendidikan politik. Dalam memberikan pendidikan politik bagi siswa Ibu Indah dibantu dengan alat peraga.

Alat tersebut yaitu ular tangga pemilu.

b. Sosialisasi

penyangang disabilitas

Mengapa sosialisasi penyangang disabilitas masuk dalam agen unformal karena sosialisasi tersebut berfokus pada pemilih pemula dan sosialisasi ini dilakukan di sekolah. Seperti halnya KPU goes to school pihak KPU memberikan sosialisasi sekaligus pendidikan politik untuk pemilih pemula penyangang disabilitas.

c. Tot Pemilos

Tot pemilos ini berfungsi memberikan pengetahuan, pelatihan, praktik tentang bagaimana pemilihan umum. Sehingga siswa tidak hanya tahu melainkan dapat juga mempraktikan secara langsung dengan harapan dapat

diaplikasikan kembali dalam pemilihan osis di sekolah masing-masing.

d. Tot untuk guru PKn

Tot untuk guru ini berfungsi memberikan ilmu tentang cara memberikan pendidikan politik yang baik bagi siswa, pelatihan dan bimbingan agar dapat menjadi guru yang ideal. Pemilihan guru PKn tersebut dikarenakan guru PKn memiliki peran yang besar dalam mensukseskan pendidikan politik.

e. Lomba cerdas cermat

Lomba cerdas cermat merupakan salah satu cara dalam memberikan sosialisasi politik hal ini dikarenakan peserta akan belajar sendiri terkait pendidikan politik dan kepememiluan.

Seperti yang dikemukakan Gabriel Almond (Mochtar Mas' oed & Colim Mac Andrews (2010: 4) bahwa salah satu agen sosialisasi politik adalah media massa. Disamping mempermudah dalam memberikan informasi pemilihan media massa sangat efektif dalam sosialisasi pemilihan umum.

Dari keeman upaya tersebut saling berkaitan demi meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula melihat pada pilkada tahun 2010 tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2005. Oleh sebab itu pada pilkada serentak 2015 KPU Sleman berupaya keras dalam meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula. Ke enam

upaya tersebut terdiri dari upaya yang telah dilakukan dari tahun ketahun dan upaya yang baru digagas untuk meningkatkan partisipasi.

Pada tahun 2010 upaya yang telah dilakukan antara lain sosialisasi melalui radio, televisi, surat kabar namun belum menyentuh jalur pendidikan (sekolah) alhasil pada pilkada tersebut mengalami penurunan tingkat partisipasi yakni sebesar 70,68%. Gagasan melalukan TOT dan Lomba cerdas cermat dimulai tahun 2012. Hal ini mulai diterapkan untuk meningkatkan partisipasi pemilu tahun 2014 alhasil pemilu tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan yakni 81%. TOT dan Lomba cerdas cermat tersebut digunakan kembali pada

pilkada serentak 2015 dan hasil menunjukan pilkada serentak 2015 mengalami peningkatan yakni 72,23%. Meskipun peningkatan cukup sedikit tetapi kedua program tersebut terbukti memberikan peningkatan pada partisipasi masyarakat.

B. Partisipasi pemilih pemula dalam pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sleman.

Pada tanggal 9 Desember 2015 masyarakat di Kabupaten Sleman telah melaksanakan pilkada serentak. Berikut ini tabel tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2005 - 2015 :

Tabel 3. Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman pada pilkada 2005 - 2015

Tahun	Terdaftar	Suara yang sah	Presentase partisipasi	Presentase golput
2005	665.530	517.352	77,74 %	22,26 %
2010	759.458	536.519	70,64 %	29,37 %
2015	779.588	563.089	72,23 %	27,77 %

Sumber : KPU Sleman pada tanggal 21 April 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman mengalami pasang surut. Pada pilkada tahun 2005 tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman cukup tinggi namun pada tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga KPU harus bekerja keras untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan KPU Sleman guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat pada pilkada serentak

2015 ini dimana partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari pilkada sebelumnya.

Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman dipengaruhi oleh partisipasi pemilih dan partisipasi pemilih pemula. Maksud dari partisipasi pemilih adalah pemilih yang telah memiliki pengalaman dalam hal pemilihan umum atau sudah pernah menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Sedangkan pemilih pemula adalah pemilih yang belum pernah menggunakan hak suaranya sehingga perlu adanya pendidikan politik dan sosialisasi yang mendalam tentang pemilihan umum. Oleh karena itu, KPU Sleman

berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula dalam pilkada serentak 2015 guna meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Sleman.

Pemilih pemula menjadi target sosialisasi dan pendidikan politik dikarenakan beberapa alasan yakni: 1) jumlah pemilih pemula yang potensial, yakni 30 %, 2) kurangnya pemahaman dan pengalaman dalam hal pemilihan umum menyebabkan pemilih pemula riskan dijadikan sasaran politik uang atau money politic, 3) untuk membentuk pemilih pemula menjadi pemilih yang aktif dan cerdas, 4) untuk menumbuhkan kesadaran politik bagi pemilih pemula.

Beberapa alasan tersebut melatar belakangi pemilihan pemilih pemula sebagai sasaran utama dalam sosialisasi dan pendidikan politik. Upaya telah dilakukan KPU Sleman guna meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula yakni KPU Goes to School, TOT, sosialisasi melalui radio, sosialisasi pada penyandang disabilitas, lomba cerdas cermat. Dari upaya tersebut diperoleh hasil tingkat partisipasi pemilih pemula di asumsikan sebesar 72,69 % dari jumlah pemilih pemula yang terdaftar. Angka tersebut diperoleh dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman.

Tabel 4. Asumsi Presentase partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Sleman

No	Nama kecamatan	Presentase partisipasi Pemilih Pemula (asumsi)
1.	Berbah	72,42 %
2.	Cangkringan	79,27 %
3.	Depok	62,73 %
4.	Gamping	70,75 %
5.	Godean	75,43 %
6.	Kalasan	70,18 %
7.	Minggir	76,51 %
8.	Mlati	67,76 %
9.	Moyudan	78,72 %
10.	Ngaglik	67,88 %
11.	Ngemplak	73,42 %
12.	Pakem	79,44 %
13.	Prambanan	72,47 %
14.	Seyegan	78,22 %
15.	Sleman	78,13 %
16.	Tempel	80,81 %
17.	Turi	80,81 %
Rata-rata		72,69 %

*penggunaan kata asumsi dikarenakan pilkada telah berlangsung. Sedangkan presentase partisipasi pemilih pemula (asumsi) dihitung berdasarkan jumlah pengguna hak pilih (asumsi) dibagi jumlah pemilih pemula.

Sumber : KPU Sleman pada tanggal 21 April 2016

Dari tabel 8 menunjukkan presentasi pemilih pemula (asumsi) terendah yakni di kecamatan Depok yakni sebesar 62,73 % dan tertinggi di Kecamatan Tempel dan Turi 80,81 %. Selisih cukup jauh dari tiga Kecamatan tersebut. Tingkat partisipasi pemilih dan pemilih pemula (asumsi) di Kecamatan Depok terendah dikarenakan beberapa alasan yakni: 1) banyak pemilih yang terdaftar

namun tidak menggunakan hak pilihnya, 2) banyak pemilih yang telah kembali ke asalnya, 3) KPU Sleman mengakui belum melakukan pendataan secara mendalam di Kecamatan Depok mengingat banyak pendatang yang tinggal di sana.

Partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula pada tingkat Kecamatan memiliki andil yang besar terhadap partisipasi di Kabupaten. Hal ini terbukti sesuai tabel di atas apabila tingkat partisipasi di Kecamatan tinggi maka partisipasi di Kabupaten tinggi. Perlunya peningkatan sosialisasi dan pendidikan politik di tingkat Kecamatan sangat diperlukan baik melalui jalur pendidikan mau non kependidikan. Pemilih

khususnya pemilih pemula tidak hanya anak sekolah (SMA) akan tetapi anak putus sekolah pun (yang berumur sekita 17 tahun) juga memiliki hak sama dalam memperoleh pendidikan dan sosialisasi tentang pemilihan umum. Kedepannya perlu adanya perhatian khusus pada pemilih khususnya pemilih pemula yang putus sekolah.

C. Hambatan yang dihadapi KPU Sleman Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Serentak 2015

Pilkada telah dilaksanakan pada 9 Desember 2015. Berbagai upaya ditempuh KPU guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Sleman. Namun upaya tersebut mengalami

beberapa hambatan. Hambatan tersebut diantaranya:

1. KPU Sleman kekurangan Sumberdaya Manusia (SDM)

Solusi dari hambatan tersebut adalah pertama, KPU Sleman melakukan kerja sama dengan Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Guru diberikan training of trainer (TOT) tentang pendidikan pemilih sebagai bekal memberikan sosialisasi kepada siswa. Pemilihan guru sebagai agen sosialisasi karena gurulah yang berinteraksi secara langsung dan memahami karakter siswa sehingga pendidikan pemilih dapat mudah tersampaikan.

Kedua, KPU mengundang perwakilan siswa dari tiap sekolah untuk mengikuti sosialisasi. Materi sosialisasi

terkait tahapan pemilihan umum, calon Bupati dan Wakil Bupati, Visi dan Misi, Program kerja serta pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Ketiga, KPU mengadakan Perekrutan anggota KPU. Perekrutan ini bertujuan memperbanyak sumberdaya manusia terutama dalam bidang sosialisasi.

2. KPU Sleman kesulitan dalam menyampaikan sosialisasi pada penyandang disabilitas.

Solusi dari hambatan tersebut adalah pertama, KPU Sleman bekerja sama dengan lembaga atau yayasan penyandang disabilitas. Tujuannya yaitu mencari cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan pemilih disabilitas. Cara tersebut diterapkan

dalam sosialisasi serta dalam penyiapan fasilitas khusus bagi pemilih difabel seperti halnya: membuat buku panduan pemilih bagi penyandang disabilitas.

Kedua, KPU Sleman mengadakan persiapan sosialisasi dengan mengundang perwakilan penyandang disabilitas.

Tujuannya yaitu memilih cara yang tepat dalam penyampaian sosialisasi bagi penyandang disabilitas. Cara tersebut guna memperkuat cara yang dipilih KPU Sleman dengan lembaga atau yayasan penyandang disabilitas.

Ketiga, KPU Sleman mengadakan sosialisasi secara langsung pada penyandang disabilitas. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh perwakilan dari KPU Sleman didampingi

oleh tenaga ahli sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Guna tenaga ahli yaitu sebagai penerjemah atau penjembutan antara penyandang disabilitas dengan perwakilan KPU Sleman. Materi yang disampaikan terkait: calon Bupati dan Wakil Bupati, Tahapan Pilkada, serta pendidikan politik bagi pemilih penyandang disabilitas.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pilkada serentak 2015 terdiri dari 6 cara yaitu: KPU goes to school, sosialisasi terhadap penyandang disabilitas, sosialisasi Melalui Radio, Training Of Trainer (TOT) Pemilu Osis Sma/Smk/Ma Se-

Kabupaten Sleman, Training Of Trainer (TOT) tentang pendidikan pemilih untuk Guru PKn SMA/SMK/MA Se-Kabupaten Sleman, cerdas cermat kepemiluan dan demokrasi bagi siswa SMA/SMK/MA se Kabupaten Sleman. Namun dari keenam upaya tersebut yang terbukti secara signifikan memberikan peningkatan adalah TOT dan Cerdas cermat.

Kedua, Partisipasi pemilih pemula dalam pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari pilkada tahun 2010. Pada pilkada serentak 2015 partisipasi pemilih pemula sebesar 72,62% sedangkan pada pilkada tahun 2010 diasumsikan sebesar 70,23 %.

Ketiga, Hambatan yang dihadapi KPU Sleman dalam

meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pilkada serentak 2015. Dari berbagai upaya guna mensukseskan pilkada serentak 2015 terdapat beberapa hambatan yang dihadapi KPU diantaranya: a. Kurangnya sumber daya manusia solusi dari hambatan tersebut adalah kerja sama dengan guru PKn, dan mengadakan perekrutan anggota baru, b. KPU kesulitan dalam penyampaian terhadap pemilih disabilitas solusi dari hambatan tersebut adalah kerja sama dengan ahli disabilitas, dan membuat buku panduan bagi pemilih disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

a. KPU Sleman hendaknya lebih teliti lagi dalam menentukan target partisipasi pemilih pada pilkada berikutnya (tahun 2020) mengingat penentuan target pada pilkada 2015 mengacu dari pilpres dan pileg.

b. KPU Sleman hendaknya mengecek kembali data pemilih sebelum terjadinya pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah guna mengantisipasi terjadinya golongan putih.

c. KPU Sleman hendaknya melakukan sosialisasi keningkat kecamatan seperti CCK (cerdas cermat Kecamatan), KPU Goes to Kecamatan , dll mengingat terdapat pemilih

pemula yang mengalami putus sekolah.

d. KPU Sleman hendaknya memberikan sosialisasi dan pendidikan politik pada pemilih pemula penyandang disabilitas secara intensif dengan metode yang sesuai agar mudah dipahami.

e. Guru PKn sebagai pen jembatan antara KPU hendaknya mampu menginspirasi pemilih pemula sehingga pemilih pemula tertarik belajar pendidikan politik secara suka rela.

f. KPU Sleman hendaknya mengadakan kerjasama dengan mahasiswa terutama mahasiswa bidang politik, hukum, PKn guna membantu dalam memberikan sosialisai kepada pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Cholisin. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan (civics)*. Yogyakarta: Ombak.

Cholisin. 2004. *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta: tidak diterbitkan.

Scumpeter, A Joseph. 2007. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York : Harper.

<http://jogja.tribunnews.com/2015/12/08/breaking-news-pawastu-sita-1621-kuponberhadiah-mobil> pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 14.00 WIB).

Upaya KPU Sleman... (Kurnia Purwita Sari) 13

<http://m.harianjogja.com/baca/2015/12/11/pilkad-a-serentak-diypartisipasi-pemilih-tak-sesuaitarget-apapenyebabnya-669760> pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 06.00 WIB).

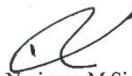
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Reviewer



Cholisin, M.Si
NIP. 19550801 198503 1 002

Pembimbing



Dr. Nasiwan, M.Si
NIP.19650417 200212 1 001